

ABSTRAK

Dita Amanda Rahmadani: Perencanaan Pemenuhan SDM Pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. **Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**

Permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari ketidaksesuaian nama jabatan dengan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari serta kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan tugas yang dikerjakan masih belum maksimal antara kualitas jabatan dalam kebutuhan instansi, dibutuhkan proses perencanaan pemenuhan SDM yang memadai berdasarkan analisis yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan SDM pada masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dapat menghindari terjadinya salah urus dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tupoksi nya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan pemenuhan SDM yang di lakukan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk menganalisis perencanaan pemenuhan SDM, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan pemenuhan SDM yang dilakukan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah berjalan dengan baik namun masih menemui beberapa kendala yang belum sepenuhnya terealisasi dari segi teknis terkait beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu pada kebutuhan pegawai yang berkurang setiap tahunnya dikarenakan mutasi pegawai dari batas usia pensiun pegawai sehingga terjadinya kekurangan jabatan yang menyebabkan beberapa SDM yang melakukan tugas dan fungsi yang tidak sesuai dengan jabatannya dalam mencapai tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan usulan kebutuhan SDM telah disampaikan berdasarkan hasil kebutuhan pegawai namun tidak sepenuhnya jumlah kebutuhan terpenuhi.

Kata Kunci: Perencanaan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRACT

Dita Amanda Rahmadani: Planning for the Fulfillment of Human Resources in the Development and Promotion of Goods and Services Procurement at the Regional Secretariat of the Province of West Kalimantan. **Undergraduate Thesis. Pontianak: Public Administration Science Study Program of Political and Social Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.**

The problems in this study included a discrepancy between position names and daily duties and functions, and a lack of human resources, resulting in tasks that were not optimal between the quality of the position and the institution's needs. A planning process for fulfilling adequate human resources was needed based on accurate, integrated analysis, and continuously to ensure the availability of human resources in the organisation in the present and future, in order to avoid mismanagement and overlap in the performance of their tasks and functions. This research aimed to explain how the Bureau of Procurement of Goods and Services executes Human resources fulfillment planning in order to examine Human resources fulfillment planning; thus, qualitative research methodologies and a descriptive approach were applied. The results of this study indicated that, in general, the Bureau of Procurement of Goods and Services' planning for the fulfillment of human resources had been proceeding satisfactorily, but still faced several obstacles that had not been fully realized from a technical standpoint due to several obstacles in its implementation, namely the need for employees, which decreased every year due to employee mutations from the retirement age limit for employees, so that the need for employees decreased.

Keywords : Human Resources Fulfillment Planning, The Regional Secretariat of West Kalimantan Province



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Perencanaan Pemenuhan SDM Pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat”. Permasalahannya yaitu ketidaksesuaian nama jabatan dengan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari; kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan adanya permasalahan yang ada, maka dari itu perlunya proses perencanaan pemenuhan SDM yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pegawai agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan nama jabatan dan tupoksi agar pekerjaan dapat berjalan dengan maksimal.

Fokus penelitian ini yaitu Proses Perencanaan Pemenuhan SDM Pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa/Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pemenuhan SDM dengan proses perencanaan pemenuhan SDM dalam melaksanakan tupoksi pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemahaman Schuler (1987:62-78) sebagaimana di kutip oleh (Suwatno dan Donni, 2011:49-50), terdapat empat tahapan penting dalam proses perencanaan SDM, yaitu: a) *Gathering, Analyzing, and Forecasting Supply and Demand*

Data, b) *Establishing Human Resource Objectives and Policies*, c) *Human Resource Programming*, d) *human Resource-Planning-Control and Evaluation*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; Kepala Sub.Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; dan Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini terdiri dari: 1). *Gathering, Analyzing, and Forecasting Supply and Demand Data*. Dengan hasil yaitu Berkaitan dengan proses investigasi dalam perencanaan pemenuhan SDM pada bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan Mengklarifikasi kebutuhan SDM sesuai dengan masing-masing bidang dan menetapkan kebutuhan jabatan dalam masing-masing bidang. Berdasarkan hasil observasi, penulis mlihat bahwa adanya uraian pekerjaan di Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah jelas tertuang dalam analisis jabatan yang dimiliki oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa perangkat daerah tersebut, akan tetapi belum dapat dipahami sepenuhnya oleh seluruh pegawai sehingga perlu diarahkan lebih lanjut untuk tugas-tugas tertentu, 2). *Establihing Human Resource Objectives and Policies*. Dengan hasil yaitu Dalam penetapan tujuan mengenai perencanaan pemenuhan SDM di Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa patokan penetapan tujuan melalui proses mengumpulkan, menginvestigasi,

menganalisis dan memprediksi data, ini semua ada di Anjab ABK, yang dimana Anjab Abk sendiri sudah dilegalkan oleh SK Gubernur. Berdasarkan hasil observasi, telah menetapkan tujuan yang sudah dilegalkan oleh SK Gubernur. Dalam hal ini Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa telah menyusun Rencana Strategis Organisasi yang dibuat tiap kurun waktu yang kemudian Renstra tersebut menjadi dasar acuan Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun program dan kegiatan serta Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa/Jasa telah memperhatikan skala prioritas kegiatan yang menunjang visi dan misi. 3). *Human Resource Programming*. Dengan hasil yaitu menempatkan SDM sesuai dengan kompetensi pegawai, agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ya menempatkan di posisi sesuai dengan tupoksi SDM tersebut agar pegawai bekerja sesuai dengan nama jabatannya, tugas pokok dan fungsi yang dilekatkan di SDM tersebut. Berdasarkan hasil observasi, dapat melihat dan memahami bahwa pola penempatan pegawai sebagian telah sesuai dengan tupoksinya, akan tetapi masih ada pegawai belum sesuai dengan tupoksinya. 4). *Human Resource-Planning-Control and Evaluation*. Dengan hasil yaitu Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu, ke tujuan organisasi itu sendiri, target yang kita buat di dalam peta jabatan dan Anjab ABK. Berdasarkan hasil observasi, bahwa pekerjaan pegawai belum sesuai dengan tupoksi atau kompetensi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Perencanaan Pemenuhan SDM di Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa bahwa pada bagian tersebut memiliki masalah yang berkaitan dengan tupoksi pegawai dan kurang SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Perencanaan Pemenuhan SDM harus dilakukan dengan cara baik agar latar belakang pendidikan SDM yang dibutuhkan dalam memenuhi pada Bagian tersebut sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga terkait masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksi yang dikerjakan oleh pegawai dapat dikerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.